

ANALISIS PENGADAAN OBAT PROGRAM RUJUK BALIK DAN PROLANIS DI APOTEK SANA FARMA KOTA SEMARANG DALAM PRESPEKTIF INPUT

Murni¹, Septo Pawelas Arso², Rani Tiyas Budiyantri³

Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro

Email: murniprima80@gmail.com

ABSTRACT

Sosial and Health Insurance Administration Organization in choosing network health facilities are used several criteria include the human resources, infrastructure, service scope and commitment, this is a demand for health facilities in collaboration with BPJS Kesehatan to improve the quality of existing resources. The pharmacy as a network health facility serves as the person in charge of ensuring the availability of medicines for the Referral and the Chronic Disease Management Program. So to guaranteed the availability of drugs and it was not empty, the government was provided e-purchasing access to the pharmacy collaboration with Health Insurance Administration Organization in the procurement of drugs and it is expected that the pharmacy can increase the quality of the resources it has. The purpose of the study was to analyze the procurement of drugs related to the Referral Program and the Chronic Disease Management Program at the Sana Farma Pharmacy in the input perspective (labor, budget, prosedure, facilities).

This research is qualitative research with descriptive analytic approach. Data collection was conducted using an indepth interview method, selected based on purposive technique. The research subject was the pharmacy staff (Procurement Staff, Pharmacists, Finance Staff, Billing and Entry Staff, and Pharmacist Assistant) while the triangulation informants were the Pharmacy Manager and BPJS Health Quality Assurance Chief. The factors studied were labor, budget, prosedure, facilities. The results of the study there is a mismatch between what is implement by Sana Farma Pharmacy and applicable regulations on labor factors, there was no training, the budget have delay in disbursement, inadequate facilities, the SOPs for the procurement of Referral and the Chronic Disease Management Program drugs were not available. The results of this study suggest improving infrastructure to support the procurement of Referral and the Chronic Disease Management Program drugs to be effective and efficient procurement.

Keywords : *Referral and the Chronic Disease Management Program, E-purchasing, Procurement, Input*

Bibliography : *13, 1996-2018*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Data Rikesdas tahun 2013 penyakit kronis Diabetes Melitus dan Hipertensi prevelensinya mencapai 6,9% dan 9,4%.¹ Oleh karena itu BPJS Kesehatan selaku badan penyelenggara dalam program

penjaminan kesehatan nasional membentuk 2 program unggulan terkait penanggulangan penyakit kronis tersebut yaitu Program Rujuk Balik dan Prolanis. PRB dan Prolanis adalah program dengan prinsip *cost effective* dan *cost-efficiency* dimana program ini akan

menekan biaya dan efektif mencegah timbulnya penyakit yang lebih parah. PRB dan Prolanis juga merupakan program yang melibatkan berbagai pihak di bidang kesehatan. Pihak yang terkait dalam PRB dan Prolanis adalah BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara sekaligus penanggungjawab, FKTP dan FKTRL sebagai pelaksana program serta Apotek/Depo Farmasi sebagai penjamin ketersediaan obat.^{2,3} Apotek sebagai fasilitas penjamin ketersediaan obat PRB dan Prolanis tentunya berkewajiban untuk selalu menyediakan dan mencegah kekosongan atau *stock out*. Sehingga proses management obat di apotek yang baik sangatlah penting

Pada tahun 2014 - 2018 apotek jejaring BPJS masih mengalami kekosongan, hal ini sesuai dengan penelitian lanastasya (2014) bahwa pada tahun 2014 apotek jejaring BPJS Kesehatan di Jakarta Pusat mengalami kekosongan obat PRB selama 3 bulan berturut-turut.⁴ Hal serupa juga dilakukan oleh penelitian Hanifah (2018) bahwa pada awal tahun 2018 terjadi kekosongan obat Prolanis di beberapa apotek jejaring BPJS Kesehatan Kota Semarang.⁵ Kekosongan ini disebabkan karena PBF lebih memprioritaskan Rumah Sakit dan Apotek masih menggunakan sistem manual dalam pengadaan obat.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan akses e-*purchasing* kepada fasilitas kesehatan swata jejaring BPJS Kesehatan pada bulan April tahun 2018.⁶ Berdasarkan hasil studi pendahuluan dari 11 apotek jejaring BPJS Kesehatan KC Semarang di Kota Semarang Apotek Sana Farma Kedungjati merupakan apotek yang pertama kali memiliki akses e-

purchasing. Selain itu apotek Sana Farma merupakan apotek terbesar cakupan wilayahnya yaitu 47 FKTP di Semarang Selatan.

Pada studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti peserta Prolanis di salah satu FKTP cakupan Apotek Sana Farma enggan melakukan kunjungan rutin karena mengalami pelayanan obat yang kurang baik, dimana pada bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2018 telah beberapa kali mengalami kekosongan obat.

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa dalam penjaminan terhadap ketersediaan obat PRB dan Prolanis memiliki peran yang penting terhadap keberlanjutan kedua program tersebut. Sehingga perlu dilakukan kerjasama dan kesiapan sumber daya antar pihak yang terkait. Berdasarkan permasalahan diatas, mendukung peneliti untuk menganalisis aspek-aspek yang terkait dengan pengadaan obat PRB dan Prolanis dengan menggunakan pendekatan sistem Azrul Azwar (1996). Pendekatan ini meliputi masukan, proses, keluaran, dan lingkungan.⁸

Dalam sebuah sistem, input (masukan) yang tersedia sangatlah penting. Hal ini dikarenakan dalam input (masukan) terdiri dari berbagai sumber daya antara lain dana, tenaga, pedoman dan sarana prasarana. Aspek input juga memegang peranan penting dalam proses selanjutnya, dimana input yang kurang baik akan mengganggu proses manajemen selanjutnya. Kekurangan dana, kekurangan tenaga, tidak ada SOP, dan tidak memiliki sarana prasarana yang layak akan menghambat bahkan menghentikan suatu sistem yang berjalan.

Pemilihan faskes jejaring BPJS Kesehatan berdasar peraturan yang

berlaku menggunakan syarat antara lain SDM, kelengkapan dari peralatan/ sarana dan prasarana, serta lingkup dan komitmen pelayanan, hal ini menjadi tuntutan bagi faskes jejaring BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki.⁹ Pentingnya aspek input dalam suatu sistem mendukung peneliti untuk melakukan penelitian tentang analisis prespektif input pengadaan obat terkait Program Rujuk Balik (PRB) dan Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Apotek Sana Farma Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan wawancara mendalam kepada informan/subjek yang kriterianya telah dipilih secara *purposive* oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran serta menganalisis terkait faktor input yang mempengaruhi pengadaan obat terkait Program Rujuk Balik (PRB) dan Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Apotek Sana Farma Kota Semarang.

Subjek dalam penelitian ini yaitu terdiri dari informan utama dan triangulasi yang sudah ditetapkan dan dipilih berdasarkan kriteria inklusi/ eksklusif. Informan utama terdiri dari Asisten apoteker, Apoteker, Staff pengadaan, Staff entri dan penagihan, serta Staff keuangan masing-masing 1 orang. Sedangkan untuk informan triangulasi terdiri dari Manager Apotek dan Kepala PMP BPJS KC Semarang.

Faktor yang dianalisis berdasarkan pendekatan teori sistem yang berfokus pada aspek

masukan atau input yang terdiri dari tenaga, dana, pedoman dan sarana prasarana terkait pengadaan obat dalam PRB dan Prolanis. Untuk pengolahan data dimulai dari proses reduksi, kemudian penyajian data, selanjutnya penarikan kesimpulan dan yang terakhir dilakukan uji validasi menggunakan 3 cara yaitu kredibilitas, dependability, dan konfirmabilitas. Penelitian yang dilakukan juga telah divalidasi dengan *ethical clearance* dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor : 26/EA/KEPK-FKM/2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Karakteristik Informan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan metode *indepth interview* dengan subjek penelitian yang ditetapkan dan dipilih berdasarkan kesesuaian pengetahuan dan informasi yang dimiliki subjek penelitian terkait pengadaan obat terkait PRB dan Prolanis Apotek Sana Farma Kota Semarang. Berikut merupakan gambaran secara umum karakteristik informan utama dan triangulasi dalam penelitian ini :

1. Informan Utama

Tabel 1. Karakteristik Informan Utama

Kode	Usia	Pendidikan Terakhir	Lama Kerja
IU 1	40	SMF	20
IU 2	42	D3 akutansi	20
IU 3	38	SMK Farmasi	17
IU 4	76	Apoteker	22
IU 5	43	D3 akutansi	21

Tabel 1 menunjukkan bahwa Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari staff yang berkaitan langsung terkait pengadaan obat PRB dan Prolanis yang merupakan

staff yang ada di Apotek Sana Farma Kota Semarang.

2. Informan Triangulasi

Tabel 2. Karakteristik Informan Triangulasi

Kode	Usia	Pendidikan Terakhir	Lama Kerja
IT 1	38	Apoteker	17
IT 2	38	S2	13

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa informan triangulasi merupakan pihak yang berkaitan secara tidak langsung dalam pengadaan obat Program Rujuk Balik (PRB) dan Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Informan ini terdiri dari pihak Apotek dan BPJS Kesehatan.

Deskripsi dan Analisis Faktor-faktor Input (Masukan) dalam Pengadaan Obat terkait Program Rujuk Balik (PRB) dan Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Apotek Sana Farma.

1. Tenaga

Kualitas tenaga kerja disebuah institusi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu ketersediaan dan kecukupan, serta karakteristik (tingkat pendidikan dan pelatihan) yang di miliki sumber daya manusia. Jumlah tenaga kefarmasian di apotek Sana Farma terdiri dari 6 orang asisten apoteker, kemudian apoteker, petugas pengadaan dan gudang, petugas administrasi, petugas entri dan penagihan masing-masing 2 orang. Berdasar Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 dalam mendirikan apotek harus memiliki minimal 1 apoteker dan tenaga teknis kefarmasianhal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga di Apotek Sana Farma sudah mencukupi dan sesuai peraturan yang berlaku¹⁰

Pada karakteristik tenaga, tingkat pendidikan tenaga di Apotek Sana Farma memiliki kesesuaian dengan profesi dimana Apoteker

dan tenaga teknis kefarmasian memiliki latar pendidikan yang sesuai yaitu apoteker, D3 farmasi atau SMF. Staff administrasi, keuangan juga memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai yaitu D3 Akuntansi. Akan tetapi seluruh staff belum mendapatkan pelatihan baik dari pihak internal yaitu apotek maupun pihak eksternal yaitu BPJS Kesehatan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk ketidaksesuaian dengan Permenkes Nomor 889 Tahun 2011 dimana tenaga kefarmasian wajib diperlukan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan.¹¹

2. Dana

Dana yang digunakan dalam pengadaan obat merupakan dana yang bersumber dari pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Besar dana dalam setiap bulannya berkisar antara 300 – 400 juta. Dalam kecukupan dana terdapat kendala terkait pencairan dana yang terlambat dari BPJS Kesehatan, dimana terjadi keterlambatan pembayaran selama 8 bulan. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 menyatakan BPJS berkewajiban membayar sesuai klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan dan dibayarkan 15 hari setelah terpenuhi syarat dokumen dan verifikasi dan membayarkan denda sebesar 1% apabila terlambat membayar klaim akan tetapi denda hanya berlaku apabila laporan klaim yang tepat waktu.

3. Pedoman/SOP

Penilaian SOP dalam pengadaan obat PRB dan Prolanis dilihat dari ketersediaan pedoman dan penerapannya. Apotek Sana Farma sudah memiliki buku pedoman/ SOP dari perusahaan pusat yaitu Buku Pedoman Pengelolaan Apotek PT Bhakti

Medika Sejahtera Tahun 2017. Dalam pedoman ini mengatur SOP pelayanan dan pengadaan obat di apotek dan tupoksi masing-masing petugas. Sedangkan untuk pedoman dari BPJS Kesehatan belum tersedia.

SOP lain yang digunakan oleh apotek Sana Farma adalah Surat Edaran LKPP Nomor 3881/D.2/04/2018 terkait prosedur akses pengadaan obat melalui *e-purchasing*. Untuk ketersediaan pedoman pengadaan obat Program Rujuk Balik (PRB) dan Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dari BPJS Kesehatan belum ada sehingga menggunakan pedoman seperti obat umum hanya berbeda pada jenis obat dan cara pemesanannya.

Penerapan SOP pada Apotek Sana Farma dilakukan berdasar Buku Pedoman Pengelolaan Apotek PT Bhakti Medika Sejahtera Tahun 2017 dimana staff menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada dalam buku pedoman, pengadaan obat juga sudah dilakukan dengan *e-purchasing*.

4. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan yang digunakan dalam proses pengadaan obat antara lain adalah komputer, koneksi internet, dan printer.

Tabel 3. Hasil Observasi Sarana dan Prasarana pendukung pengadaan obat PRB dan Prolanis.

No	Uraian	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
1	Komputer/ Laptop	√	
2	Internet/ wifi	√	
3	Printer	√	

Untuk ketersediaannya ada 1 printer dan 4 komputer yang terletak di bagian pengadaan dan gudang 2 buah, kemudian 1 buah di bagian

pelayanan dan penagihan, dan 1 buah dibagian keuangan.

Kelayakan dari sarana prasarana yang ada di Apotek Sana Farma masih kurang baik dimana jumlah komputer yang tersedia masih kurang terutama di bagian pelayanan dan pengihan, hal ini menyebabkan apabila kondisi ramai pengunjung penggunaan komputer dilakukan secara bergantian. Kemudian jenis komputer masih komputer lama sehingga tidak mampu menerima pembaruan *software* atau program baru. Ketersediaan komputer yang masih kurang dan jenis komputer yang lama menimbulkan dampak pada terhambatnya proses pengadaan obat, pemesanan obat serta pengiriman laporan/ klaim. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana yang ada di Apotek Sana Farma belum sesuai dengan Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 karena belum mampu mendukung dalam menjamin mutu sediaan farmasi dan kelancaran praktik pelayanan farmasi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan staff terutama untuk pengadaan obat di Apotek Sana Farma Kedungjati Semarang baik secara internal maupun eksternal belum ada sehingga perencanaan pengadaan obat baik secara manual dan *e-purchasing* hanya berdasarkan pengalaman
2. Pencairan dana terkait pengadaan obat PRB dan Prolanis yang bersumber dari BPJS Kesehatan masih mengalami keterlambatan dan belum

tersosialisasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018

3. Sarana dan prasarana di Apotek Sana Farma kurang memadai dimana komputer yang tersedia di Apotek Sana Farma Kedungjati Semarang memiliki jumlah yang terbatas dan jenis komputer masih komputer produk lama sehingga kurang mampu melakukan pekerjaan dengan sistem dan aplikasi yang *update*. Hal ini menyebabkan keterlambatan entri data penagihan serta pengiriman berkas klaim penagihan ke BPJS Kesehatan yang berujung pada keterlambatan pembayaran klaim BPJS kepada Apotek Sana Farma Kedungjati Semarang dan tidak berlakunya denda 1% oleh BPJS Kesehatan atas keterlambatan pembayaran klaim kepada apotek.

4. Pedoman atau SOP untuk pengadaan obat khusus PRB dan Prolanis dari BPJS Kesehatan tidak ada.

SARAN

1. Bagi Apotek Sana Farma Kedungjati Kota Semarang

a. Memfasilitasi pelatihan khusus dalam manajemen pengelolaan logistik khususnya untuk PRB dan Prolanis kepada staff pengadaan.

b. Melakukan perbaikan sarana prasarana terutama komputer untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan apotek

c. Menindak lanjuti dan menjalin komunikasi yang lebih *intens* terkait penunggakan pembayaran BPJS Kesehatan untuk menjaga keseimbangan dana; ketersediaan obat serta keberlangsungan persediaan obat.

d. Memperbarui buku pedoman pengelolaan apotek terutama pengelolaan obat terkait pengadaan obat untuk Program Rujuk Balik dan Prolanis melalui *e-purchasing*.

2. Bagi BPJS Kesehatan Kota Semarang

a. Melakukan pembentukan SOP atau pedoman terkait pengadaan obat untuk PRB dan Prolanis

b. Meningkatkan komitmen terkait pembayaran klaim kepada apotek PRB sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013. Jakarta: 2013
2. BPJS Kesehatan. Buku Pedoman Praktis Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis). 2014
3. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3881/D.2/04/2018 apotek jejaring BPJS Kesehatan dapat melakukan pembelian melalui *e-purchasing*
5. Ianastasya dan Mardiaty Nadjib. Gambaran *Stock Out* Obat Program Rujuk Balik Bagi Peserta JKN di BPJS Kesehatan Jakarta Pusat Pada Juni – Agustus 2014. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. 2014
6. Dyah, Hanifah P. Analisis Implementasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis di Puskesmas Bulu Lor dan Puskesmas Karanganyar Kota Semarang. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro. 2018

7. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang. 2018
8. Azwar, Azul. Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga. Jakarta. PT Binarupa Aksara : 1996
9. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.
11. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
12. Presiden RI. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.